

**ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN
PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2003-2012**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

DEVI NURITA NOVIANA

NIM 12020110120014

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Devi Nurita Noviana

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120014

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN
PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2003-2012**

Dosen Pembimbing : Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

Semarang, 18 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.)

NIP. 19551208 198003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Devi Nurita Noviana

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120014

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN
PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2003-2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Juli 2014

Tim Penguji :

1. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc (.....)

2. Prof. Dra. Hj. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D (.....)

3. Hastarini Dwi Atmanti, SE, M.Si (.....)

Mengetahui

Pembantu Dekan I

(Anis Chairi, M.Com., Ph.D)

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Devi Nurita Noviana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2012 , adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk kalimat atau rangkaian simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Juli 2014

Yang membuat pernyataan,

(Devi Nurita Noviana)

NIM : 12020110120014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Man jadda wajada” yang berarti , “siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses”

“Man shabara zhafira” yang berarti , “siapa yang bersabar akan beruntung.”

“Man Saara Ala Darbi Washala” yang berarti, “siapa yang berjalan di jalannya akan sampai tujuan”

(Pepatah Arab , Trilogi Negeri 5 Menara)

Skripsi ini kupersembahkan untuk Papah ,

Mamah, Kakak , Adik- adikku,

Sahabat dan Teman.

thank you for always be there and supporting me.....

ABSTRACT

Income inequality inter-regions is one of complex problem in Indonesia. DI Yogyakarta has a high level of inequality compared to other provinces in the Java. It is proved by Gini index of all provinces in Java Island from 2003 to 2012. This study aimed 1) to count the degree of income inequality between regency/cities, 2) to find out the potential sectors and 3) to prove whether Kuznets curve is occurred in DI Yogyakarta.

The analysis method that used in this study is analysis of Williamson index and Entropy Theil Index to measure income inequality inter-regions, Location Qoutient analysis (LQ) and shift share analysis to find out potential secotrs in DI Yogyakarta and Typology Klassen analysis to group each region based on economic growth and income per capita and to group sectors in the classification of 4 quadrants.

The results indicates that income inequality in the regencies/cities in DI Yogyakarta is high (> 0.5), which the result of analysis of Williamson Index is 0.71 and analysis of Entropy Theil index is 4.354. Meanwhile, the inverted "U" Kuznets Curve hypothesis which describes the relationship between growth and inequality index is not occured in the DI Yogyakarta.

Based on these findings, suggestions that can be given are to increase the private investment while giving the ease of bureaucracy and the investment is directed to a relatively underdeveloped area. In addition, to develop and enhance the potential sectors in each regions in order to improve the economic growth in DI Yogyakarta.

Keywords: Inequality economic, growth, DI Yogyakarta

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan antar wilayah masih menjadi masalah yang kompleks di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi yang ada di Jawa hal tersebut dibuktikan dengan data Indeks Gini seluruh provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2003-2012. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menghitung tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota, 2) mengetahui sektor potensial dan 3) membuktikan berlaku atau tidaknya kurva kuznet di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar daerah, analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis Shift Share untuk mengetahui sektor-sektor potensial yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan analisis *Typology Klassen* untuk mengelompokkan tiap-tiap wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dan mengelompokkan sektor-sektor dalam klasifikasi 4 kuadran.

Hasil Penelitian menunjukkan Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi ($>0,5$) yaitu dengan analisis Indeks Williamson sebesar 0,71 dan analisis Indeks Entropi Theil sebesar 4,35. Sementara, hipotesis kurva “U” terbalik Kuznets yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dengan Indeks ketimpangan belum berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan birokrasi dan investasi tersebut diarahkan pada daerah yang realtif tertinggal. Serta, mengembangkan dan meningkatkan sektor potensial di masing-masing daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : Ketimpangan Ekonomi, Pertumbuhan , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji syukur kepada Allah Allah Subhana Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2012". Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapatkan bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
2. Dr. Hadi Sasana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
3. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan, membimbing dan memberi masukan, kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Alfa Farah, S.E., MSc, selaku dosen wali atas segala saran dan nasihat yang telah diberikan selaku dosen wali atas segala saran dan nasihat yang telah diberikan.

5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua Orang Tuaku tersayang, Papah dan Mamah tercinta (Ronzi dan Eliyani), terimakasih atas semua kasih sayang, cinta, doa serta dukungan yang selalu diberikan dengan tulus kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
7. Kakaku Rosa Yuni Setyowati, Adik-adikku Nanda Rizki Yuliani dan Bagus Surya Maulana terima kasih atas dukungan dan doa kalian.
8. Keponakanku Chavito Andika Raka Pratama, Muhammad Dhaffa Saputra dan Khumaira Najwa Ilham yang menjadi obatku dikala sedang sedih.
9. Seluruh Keluarga Besar Om Pandu (Alm) , Tante Uswatun Khasanah dan Mbak Ike terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
10. Seseorang yang telah memberi cinta dan kasih sayangnya, Muhammad Suwondo, terima kasih atas kesabaran untuk menemani penulis dalam suka dan duka. Semoga Allah mengijinkan kita selalu bersama. Amin.
11. Kakak Angkatan Mas Putra, Mbak Dien, Mbak Via, Mbak Sandra yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Kos Gasinta : Yulianti , Sarah, dan seluruh penghuni kos lainnya yang selalu berbagai suka dan duka dalam kehidupan makasih semuanya kalian adalah keluarga keduaku.
13. *GG Bias* (Riana, Rosi, Wida, Angga, Yani, Rahmi, Ika, dan Ayu) terima kasih untuk persahabatan yang tak pernah terlupakan selama ini.

14. Seluruh Teman-teman IESP 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan. Sukses buat kita semua.

15. Karyawan perpustakaan BPS Jawa Tengah, BPS DIY dan BAPPEDA DIY yang telah membantu penulis dalam pencarian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan skripsi ini.

16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta pihak yang berkepentingan.

Semarang, 22 Juli 2014

Penulis

Devi Nurita Noviana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan & Kegunaan penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian	13
1.3.2. Kegunaan Penelitian	14
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori & Penelitian Terdahulu	16
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2. Ketimpangan Pendapatan Regional	17
2.1.3. Ukuran ketimpangan Pembangunan Antarwilayah	19
2.1.4. Teori Petumbuhan Regional	21
2.1.5. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan	22
2.1.6. Analisis Potensi Perekonomian Wilayah	23
2.1.6.1. Pengukuran sektor basis	24

2.1.6.2. Pengukuran sektor yang berkembang didaerah (<i>Shift Share</i>).....	25
2.1.6.3. Tipologi Klassen	26
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.2. Populasi.....	42
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis.....	44
3.5.1. Analisis Tingkat Ketimpangan Regional	44
3.5.1.1. Indeks Williamson	44
3.5.1.2. Indeks Entropi Theil.....	46
3.5.2. Analisis Location Quotient (LQ).....	47
3.5.3. Analisis Shift Share.....	48
3.5.4. Analisis Tipologi Klassen.....	50
3.5.5. Analisis Kurva U terbalik	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Deskripsi Profil Objek Penelitian	54
4.1.1. Keadaan Geografis	54
4.2. Demografis Antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	56
4.3. Profil Perekonomian Antar Kabupaten/kota di Provinsi DIY	58
4.3.1. PDRB, Laju pertumbuhan PDRB dan Kontribusi PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012.....	58
4.3.2. PDRB Perkapita Antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	62
4.4. Analisis Data	63
4.4.1. Analisis Ketimpangan Pendapatan.....	63
4.4.1.1. Indeks Williamson	64
4.4.1.2. Indeks Entropi Theil.....	64

4.4.1.3. Analisis Perbandingan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.	65
4.4.2. Analisis Location Quotient (LQ)	66
4.4.3. Analisis Shift Share	71
4.4.3.1. Analisis Shift Share dengan data dasar PDRB	71
4.4.3.1.1. Analisis Shift Share Kabupaten Kulon Progo	71
4.4.3.1.2. Analisis Shift Share Kabupaten Bantul	73
4.4.3.1.3. Analisis Shift Share Kabupaten Gunungkidul	75
4.4.3.1.4. Analisis Shift Share Kabupaten Sleman	77
4.4.3.1.5. Analisis Shift Share Kota Yogyakarta	79
4.4.3.2. Analisis Shift Share dengan data dasar Tenaga Kerja	82
4.4.3.2.1. Analisis Shift Share Kabupaten Kulon Progo	82
4.4.3.2.2. Analisis Shift Share Kabupaten Bantul	84
4.4.3.2.3. Analisis Shift Share Kabupaten Gunungkidul	85
4.4.3.2.4. Analisis Shift Share Kabupaten Sleman	87
4.4.3.2.5. Analisis Shift Share Kota Yogyakarta	89
4.4.4. Analisis Typology Klassen	91
4.4.4.1. <i>Typology Klassen</i> dengan pendekatan sektoral	92
4.4.4.1.1. Kabupaten Kulon Progo	92
4.4.4.1.2. Kabupaten Bantul	94
4.4.4.1.3. Kabupaten Gunungkidul	96
4.4.4.1.4. Kabupaten Sleman	98
4.4.4.1.5. Kota Yogyakarta	100
4.4.4.2. Analisis <i>Typology Klassen</i> dengan Pendekatan Wilayah	102
4.4.5. Sektor Potensi yang dimiliki kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	104
4.4.6. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan	108
BAB V PENUTUP	115
5.1. Simpulan	115

5.2. Keterbatasan	117
5.3. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	PDRB (Miliar Rupiah) & Laju Pertumbuhan PDRB (%) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Pada Tahun 2003-2012..... 3
Tabel 1.2	Tabel Indeks Gini menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2003-2012..... 5
Tabel 1.3	Tabel Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2012. 7
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2012 (%) 8
Tabel 1.5	PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2012 (Rupiah)..... 9
Tabel 1.6	Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja seminggu yang lalu menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012..... 11
Tabel 2.1	Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen..... 27
Tabel 3.1	Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen..... 51
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Luas Wilayah (Km ²) antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2003-2012..... 57
Tabel 4.2	PDRB Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2012 (Jutaan Rupiah) 59
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012 (%) 60
Tabel 4.4	Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012 (%) 61

Tabel 4.5	PDRB Perkapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2012 (Rupiah).....	63
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/kota di Provinsi DIY, 2003-2012.....	64
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Indeks Entropi Theil Kabupaten/kota di Provinsi DIY, 2003-2012.....	65
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Rata-rata nilai LQ Antar Kabupaten/kota di Provinsi DIY Tahun 2003-2012	67
Tabel 4.9	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Kulon Progo 2003-2012	71
Tabel 4.10	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Bantul 2003-2012	73
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Gunungkidul 2003-2012	75
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Sleman 2003-2012.....	77
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Shift Share Kota Yogyakarta 2003-2012.....	79
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Kulon Progo 2007-2012	82
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Bantul 2007-2012	84
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Gunungkidul 2007-2012	85
Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten Sleman 2007-2012.....	87
Tabel 4.18	Hasil Perhitungan Shift Share Kota Yogyakarta 2007-2012.....	89
Tabel 4.19	Rata-rata PDRB dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi DIY dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003-2012.....	92
Tabel 4.20	Hasil Analisis <i>Typology Klassen</i> menurut per sektor Kabupaten Kulon progo di Provinsi DIY tahun 2003-2012	93
Tabel 4.21	Rata-rata PDRB dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul Tahun 2003-2012	94

Tabel 4.22	Hasil Analisis <i>Typology Klassen</i> menurut per sektor Kabupaten Bantul di Provinsi DIY tahun 2003-2012	95
Tabel 4.23	Rata-rata PDRB dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi DIY dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2012	96
Tabel 4.24	Hasil Analisis <i>Typology Klassen</i> menurut per sektor Kabupaten Gunungkidul di Provinsi DIY tahun 2003-2012	97
Tabel 4.25	Rata-rata PDRB dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman Tahun 2003-2012.....	98
Tabel 4.26	Hasil Analisis <i>Typology Klassen</i> menurut per sektor Kabupaten Sleman di Provinsi DIY tahun 2003-2012	99
Tabel 4.27	Rata-rata PDRB dan Kontribusi Sektor PDRB Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta Tahun 2003-2012.....	100
Tabel 4.28	Hasil Analisis <i>Typology Klassen</i> menurut per sektor Kota Yogyakarta di Provinsi DIY tahun 2003-2012.....	101
Tabel 4.29	Klasifikasi Wilayah <i>Typology Klassen</i> di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2003-2012	102
Tabel 4.30	Sektor-sektor Unggulan yang terdapat pada kabupaten/kota di Provinsi DIY	105
Tabel 4.31	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi Theil Provinsi DIY tahun 2003-2012.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Disparitas PDRB Perkapita dan laju pertumbuhan PDRB menurut Provinsi di Pulau Jawa 6
Gambar 1.2	Hipotesis Kuznets (Kurva U terbalik)..... 12
Gambar 2.1	Hipotesis Kuznets (Kurva U terbalik)..... 23
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran..... 40
Gambar 4.1	Peta Administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A	PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012..... 124
LAMPIRAN B	Indeks Williamson Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012..... 128
LAMPIRAN C	Indeks Entropi Theil Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012..... 135
LAMPIRAN D	Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i> Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012 139
LAMPIRAN E	Analisis Shift Share Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012..... 146
LAMPIRAN F	Analisis <i>Typology Klassen</i> Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012 187
LAMPIRAN G	Kuesioner..... 218
LAMPIRAN H	Surat Izin Penelitian 219
LAMPIRAN I	CV 226

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu : Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia (Wikipedia, 2013). Didalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah . Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti Pemerintah lebih aktif didalam membangun wilayah perkotaan dan di daerah hanya beberapa yang tersentuh di dalam pembangunan. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi Pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut BPS, PNB di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 2.517.483,3 miliar rupiah dan jumlah PNB di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut Todaro (2006), tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk dan masyarakat akan

memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu , hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun, terkadang hasil pembangunan belum merata dan masih terdapat ketimpangan antar daerah.

Menurut Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS (2010), Jumlah penduduk Jawa pada tahun 2010 adalah 136.610.590 jiwa, Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia. Pulau Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk. Pulau Jawa secara administratif terbagi menjadi empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten; serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta .

Menurut Sukirno (2004), salah satu alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian pada suatu wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui PDRB dan PDRB per kapita. Menurut BPS, PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Berikut adalah tabel 1.1 PDRB & Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Pada Tahun 2003-2012:

Tabel 1.1
PDRB (Miliar Rupiah) & Laju Pertumbuhan PDRB (%) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di
Pulau Jawa Pada Tahun 2003-2012

Tahun	DKI Jakarta		Jawa Barat		Banten		Jawa Tengah		DI Yogyakarta		Jawa Timur	
	PDRB	Laju Petumbuh an Pdrb	PDRB	Laju Petumbuha n Pdrb	PDRB	Laju Petumbuh an Pdrb	PDRB	Laju Petumbu han Pdrb	PDRB	Laju Petumbuh an Pdrb	PDRB	Laju Petumbuh an Pdrb
2003	262.565,60	5,41%	211.747,80	5,13%	51.957,40	5,07%	121.271,90	4,76%	15.360,40	4,58%	228.301,90	4,78%
2004	277.539,30	5,70%	223.349,90	5,48%	54.880,40	5,63%	127.212,00	4,90%	16.146,40	5,12%	241.628,10	5,84%
2005	294.354,60	6,06%	234.010,90	6,23%	58.106,90	5,88%	133.578,00	5,00%	16.910,90	4,73%	255.745,00	5,84%
2006	311.893,60	5,96%	248.774,40	6,31%	61.341,60	5,57%	140.681,40	5,32%	17.535,70	3,70%	270.564,90	5,79%
2007	332.034,00	6,46%	265.834,00	6,86%	65.046,80	6,04%	149.083,10	5,97%	18.291,50	4,31%	286.912,10	6,04%
2008	352.785,40	6,25%	282.745,30	6,36%	79.700,70	5,77%	157.267,70	5,49%	19.212,50	5,03%	304.470,80	5,90%
2009	370.533,50	5,03%	294.324,40	4,10%	83.453,70	4,71%	166.176,20	5,66%	20.064,30	4,43%	319.531,40	4,95%
2010	394.683,60	6,52%	313.190,50	6,41%	88.525,90	6,08%	176.187,00	6,02%	21.044,00	4,88%	340.613,70	6,60%
2011	421.130,50	6,70%	334.457,10	6,79%	94.222,40	6,43%	187.111,80	6,20%	22.129,70	5,16%	365.152,40	7,20%
2012	448.838,50	6,50%	356.309,60	6,21%	99.999,80	6,15%	210.848,40	6,34%	23.309,20	5,32%	393.666,40	7,30%
Rata-rata	346.635,86	6,04%	276.474,39	5,93%	73.723,56	5,71%	156.941,75	5,54%	19.000,46	4,70%	300.658,67	5,97%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, 2012

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir DKI Jakarta , Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten , dan Provinsi Jawa Tengah memiliki rata- rata laju pertumbuhan yang tinggi di Pulau Jawa. Sedangkan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata tingkat laju pertumbuhan yang paling rendah diantara kelima Provinsi lainnya. Hal tersebut, yang menyebabkan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mendorong pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang membaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terdapat permasalahan salah satunya terciptanya ketimpangan/disparitas pendapatan antar daerah/antar kabupaten yang dapat ditunjukkan dari Indeks Gini menurut Provinsi di Pulau Jawa. Menurut BPS, Indeks gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Berikut adalah tabel indeks gini menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2003-2012 :

Tabel 1.2
Tabel Indeks Gini menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2003-2012.

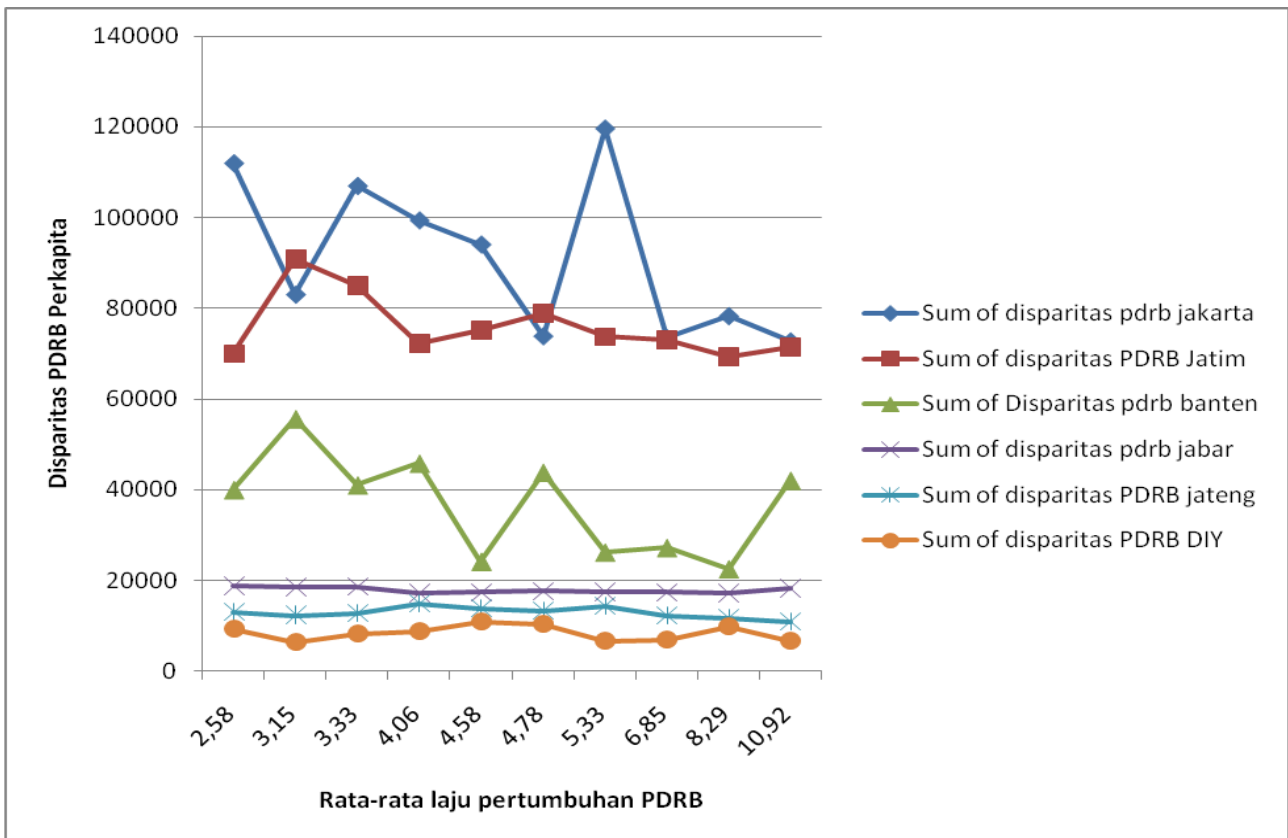
Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DKI Jakarta	0,31	0,36	0,30	0,36	0,34	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42
Jawa Barat	-	-	0,34	-	0,34	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41
Banten	-	-	0,36	-	0,37	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39
Jawa Tengah	0,25	0,25	0,31	0,27	0,33	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38
DI Yogyakarta	0,34	0,37	0,41	0,37	0,37	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43
Jawa Timur	-	-	0,36	-	0,34	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36

Sumber : BPS , Ringkasan Eksekutif pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia 2012

Berdasarkan tabel 1.2 indeks gini pada Provinsi Daerah Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dan Pada tahun 2012 Indeks Gini tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain melihat dari laju pertumbuhan dan indeks gini . Juga membandingkan hubungan laju pertumbuhan dengan disparitas PDRB Perkapita antar Provinsi di Pulau Jawa . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 1.1
Disparitas PDRB Perkapita dan laju pertumbuhan PDRB menurut Provinsi di
Pulau Jawa



Sumber : BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Indonesia 2012, diolah

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa yang menempati disparitas PDRB perkapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, kemudian Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat , Provinsi Jawa Tengah dan yang terendah adalah Provinsi DIY.

Terdapat perbedaan antara disparitas PDRB perkapita dengan indeks gini. Menurut Indeks Gini Provinsi DIY memiliki nilai gini tertinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, menurut disparitas pendapatan perkapita Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi terendah, hal tersebut terjadi karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Kabupaten/kota paling sedikit. Selain itu, Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dibanding dengan Provinsi yang berada di pulau jawa. Oleh karena itu, peneliti menjadikan Provinsi DI Yogyakarta sebagai unit observasi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Secara administratif, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kota Yogyakarta , Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman.

Berikut adalah tabel Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2012:

Tabel 1.3
Tabel Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2012.

Kab./Kota	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab.Kulon Progo	0,23	0,24	0,30	0,23	0,18	0,29	0,25	0,24	0,34	0,34
Kab. Bantul	0,29	0,33	0,34	-*	0,30	0,32	0,25	0,25	0,30	0,24
Kab. Gunung Kidul	0,22	0,24	0,28	0,23	0,21	0,25	0,24	0,25	0,30	0,31
Kab. Sleman	0,35	0,36	0,38	0,33	0,28	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27
Kota Yogyakarta	0,31	0,34	0,32	0,32	0,29	0,18	0,28	0,27	0,19	0,19

Sumber : BPS , Rasio Gini Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta 2012

Keterangan : Data Kab. Bantul 2006 tidak tersedia karena adanya bencana alam, gempa bumi.

Menurut tabel 1.3 terlihat bahwa sepanjang tahun 2003-2012 Indeks Gini 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Kabupaten yang memiliki Indeks Gini tertinggi pada tahun 2012 adalah Kabupaten Kulon Progo . Dan Kabupaten yang memiliki Indeks Gini terendah pada tahun 2012 adalah Kota Yogyakarta.

Berikut adalah rincian tabel Laju PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2012 (%):

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2003-2012 (%)

Kab/Kota di DIY	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata- rata
Kab. Kulon Progo	4,19 %	4,49%	4,77%	4,05%	4,12%	4,71%	3,97%	3,06%	4,95%	5,01%	4,29%
Kab. Bantul	4,69%	5,04%	4,99%	2,02%	4,52%	4,90%	4,47%	4,97%	5,27%	5,34%	4,49%
Kab. Gunung Kidul	3,36%	3,43%	4,33%	3,82%	3,91%	4,39%	4,14%	4,15%	4,33%	4,84%	4,05%
Kab. Sleman	5,08%	5,25%	5,03%	4,50%	4,61%	5,13%	4,48%	4,49%	5,19%	5,45%	4,91%
Kota Yogyakarta	4,76%	5,05%	4,50%	3,97%	4,46%	5,12%	4,46%	4,98%	5,64%	5,76%	4,84%
DIY	4,58%	5,12%	4,73%	3,70%	4,31%	5,03%	4,43%	4,88%	5,16%	5,32%	4,7%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa dari ke 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang berada diatas rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi DIY adalah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Sedangkan, yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang berada dibawah rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1.5
PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2003-2012 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Kulon Progo	3.616.133	3.747.449	3.920.798	4.075.586	4.239.955	4.435.553	4.609.219	4.580.532	4.790.630	4.992.18
Kab. Bantul	3.627.281	3.640.936	3.747.763	3.732.268	3.845.008	3.976.712	4.203.156	4.353.170	4.534.212	4.741.941
Kab. Gunung Kidul	3.736.926	3.846.283	4.000.254	4.141.652	4.292.535	4.470.621	4.733.514	4.930.661	5.124.333	5.319.628
Kab. Sleman Kota	4.878.095	4.977.241	5.131.220	5.240.006	5.408.803	5.612.511	5.675.733	5.830.337	6.054.435	6.341.065
Yogyakarta	10.175.589	9.815.114	10.109.338	10.269.336	10.587.919	10.989.241	13.459.208	14.167.677	14.893.159	15.612.923

Sumber : Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012

PDRB per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tertentu. Menurut Tarigan (2005), PDRB Per kapita adalah total PDRB suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Semakin tinggi tingkat PDRB perkapita di suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya . Dan sebaliknya semakin rendah tingkat PDRB perkapita di suatu wilayah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dari tabel 1.5 menunjukkan adanya perbedaan PDRB perkapita yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut terlihat dari PDRB perkapita yang mendominasi adalah Kota Yogyakarta. Kemudian pada posisi kedua terbesar adalah Kabupaten Sleman. Sedangkan, kabupaten lainnya PDRB perkapitanya jauh lebih rendah dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Penentuan sektor-sektor potensial menggunakan analisis LQ, Shift share dan tipologi klassen dengan data dasar PDRB. Selain dengan data dasar PDRB , dalam penelitian ini juga menghitung analisis shift share dengan data dasar tenaga kerja, yang bertujuan untuk melihat pergerakan tenaga kerja melalui sektor-sektor tertentu.

Tenaga Kerja dalam hal ini merupakan orang yang bekerja. Menurut BPS (2012), yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu.

Tabel 1.6
Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja seminggu yang lalu menurut
Provinsi di Pulau Jawa tahun 2012

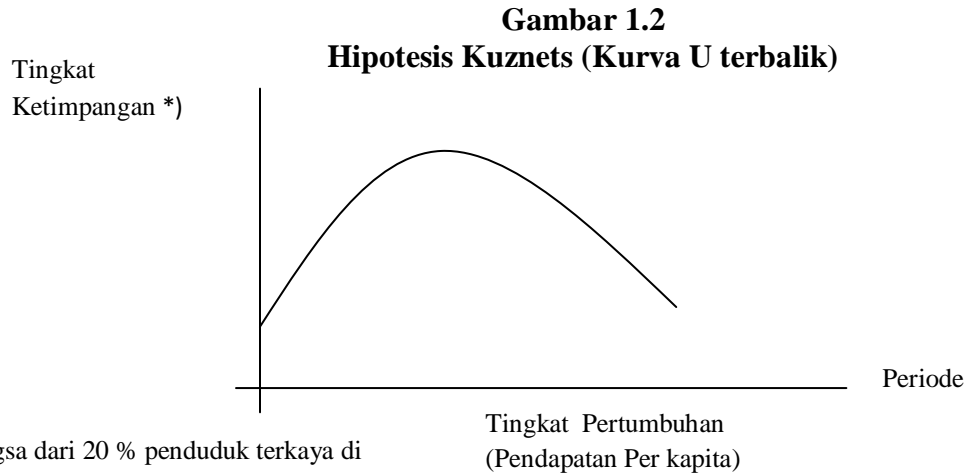
Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja
DKI Jakarta	3.838.596
Jawa Barat	18.321.108
Banten	4.605.847
Jawa Tengah	16.132.890
D.I Yogyakarta	1.867.708
Jawa Timur	19.081905

Sumber : BPS, Statistika Indonesia , 2012

Pada tabel 1.6 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tenaga kerja yang paling besar pada tahun 2012. Kemudian Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang paling kecil pada tahun 2012 adalah Provinsi D.I.Yogyakarta.

Penelitian ini juga ingin membuktikan hipotesis kuznet berlaku atau tidak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembuktian Hipotesis Kuznets dapat dilakukan dengan membuat grafik antara indeks ketimpangan dengan pertumbuhan PDRB.

Menurut Simon Kuznet dalam Todaro (2006), mengenai Hipotesis Kuznets bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznets “U-terbalik”.



*) Pangsa dari 20 % penduduk terkaya di dalam jumlah pendapatan

Sumber : Perekonomian Indonesia, Achma (2011)

1.2. Rumusan Masalah

PDRB atas dasar harga konstan dan laju pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2003-2012 . Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB paling tinggi yaitu sebesar 6,04%, tertinggi kedua adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 5,97%, tertinggi ketiga adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 5,93%, selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi banten sebesar 5,71%, kemudian rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,54%. Dan yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang paling rendah pada tahun 2003-2012 di pulau Jawa yaitu adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 4,70%.

Walaupun laju pertumbuhan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat, tetapi masih terdapat permasalahan yaitu terdapat ketimpangan

yang tinggi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari Perbedaan PDRB perkapita yang tinggi dan Indeks Gini antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2003-2012. Artinya, bahwa tingkat pertumbuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat, belum tentu diikuti dengan keberhasilan didalam pemerataan pendapatan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Sektor potensial apa saja yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas skripsi ini mengambil judul **“ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2012.”**

1.3. Tujuan & Kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis sektor potensial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Membuktikan benar/tidaknya hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sedangkan Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang adanya ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rumusan masalah tentang ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan landasan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang adanya ketimpangan antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang definisi operasional , populasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tentang ketimpangan antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembahasan tentang tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta memberikan beberapa saran terkait masalah pertumbuhan ekonmi dan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/kota di Provinsi Daaerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori & Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut Sukirno (2004), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya.

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{PDRB\ riil_t - PDRB\ riil_{t-1}}{PDRB\ riil_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan :

Y_t = Pertumbuhan ekonomi

PDRB riil = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

2.1.2 Ketimpangan Pendapatan Regional

Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tersebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya , fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya.

Menurut Kuncoro (2004), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* antar wilayah. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor- faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografi antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan, daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak pula pada terhadap tingkat pendapatan daerah.

Menurut Arsyad (1999), terdapat beberapa penelitian mengenai masalah ketimpangan ekonomi antarwilayah sudah dilakukan. Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Adanya ekspansi ekonomi pada daerah kaya akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) lebih besar dari pada pengaruh yang menguntungkan (*Spread effect*), dan akan memperlambat proses pembangunan pada daerah miskin. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan. Sejalan dengan Myrdal, Hirschman (1958) mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban (*polarization effects*).

Menurut Sjafrizal (2008), studi pertama dilakukan oleh Hendra Esmara, 1975. Menggunakan Williamson Index sebagai ukuran ketimpangan antar wilayah. Untuk mempertajam analisa, kalkulasi indeks ketimpangan disini dibedakan antara PDRB termasuk dan diluar minyak dan gas alam. Namun demikian, karena ketersediaan data tentang pendapatan regional di Indonesia pada saat itu masih sangat terbatas, maka jangka pembahasan pada analisa juga masih terbatas sehingga generalisasi untuk mendapatkan kesimpulan umum masih sulit. Kemudian

dilanjutkan oleh penelitian Uppal.J.S dan Budiono Sri Handoko (1966) menggunakan cara yang sama dan seri data yang lebih panjang.

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber , berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan antarsektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan itu menurut Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan /ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. (Mudrajad Kuncoro, 2004).

2.1.3 Ukuran ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Menurut Sjafrizal (2012), Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Formulasi Indeks Williamson secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y} \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota

Y : PDRB Per kapita Provinsi

F_i : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota

n : Jumlah Penduduk Provinsi

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1.

Kriteria penilaian Indeks Williamson menurut Tambunan, (2003) :

- a. 0 s/d 0,5 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah rendah.
- b. 0,5 s/d 1 tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah tinggi

Indeks lainnya yang juga lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah *Entropi Theil Index*. Data yang diperlukan untuk menghitung indeks ini sama dengan yang diperlukan untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Demikian pula halnya yang dengan penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata.

Menurut Ying (2000) (dikutip oleh Kuncoro 2004) untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional . Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut :

$$I(y) = \sum (y_j/Y) x \log[(y_j/Y)/(x_j/X)] \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana :

- I(y) : Indeks Entropi Theil
 y_j : PDRB per kapita Kabupaten/Kota j
 Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi
 x_j : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota j
 X : Jumlah penduduk Provinsi

Kelebihan indeks williamson lebih mudah dan praktis untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Namun terdapat kelemahan indeks Williamson adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan. Sedangkan, Kelebihan dari indeks entopi theil yang pertama adalah indeks ini menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas, yang kedua adalah indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam presentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

2.1.4 Teori Petumbuhan Regional

Menurut Arsyad (1999), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Akumulasi Modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fiskal, dan sumberdaya manusia (*human resources*).
2. Pertumbuhan Penduduk.

3. Kemajuan Teknologi.

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Robinson Tarigan, 2005):

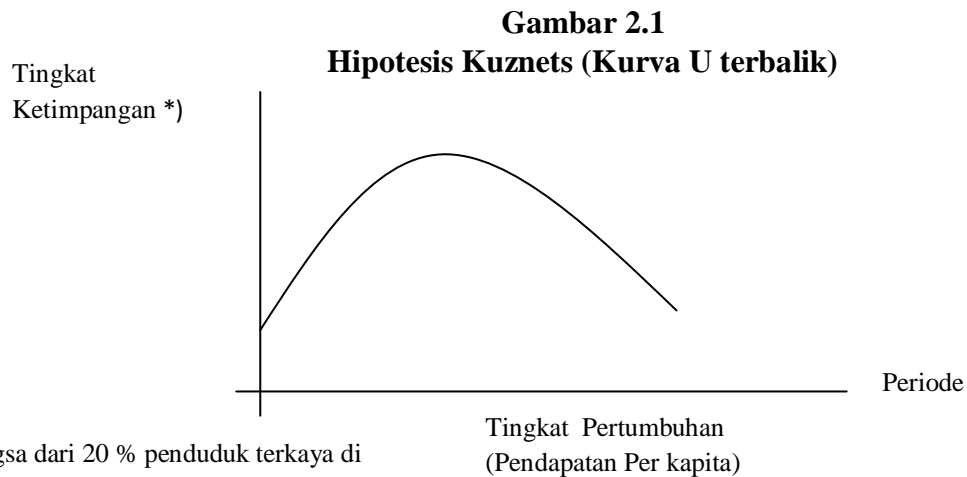
1. Keuntungan Lokasi
2. Aglomerasi Migrasi
3. Arus lalu lintas modal antar wilayah.

2.1.5 Hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan

Menurut Kuznet (1955) (dikutip oleh Hajiji, 2010) meneliti hubungan antara pertumbuhan dengan ketimpangan pendapatan yang dikenal dengan hipotesis kurva U terbalik (*Inverted U-curve Hypothesis*). Berdasarkan hipotesis ini ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonominya, kemudian pada tahap menengah cenderung tidak berubah dan akhirnya menurun ketika negara tersebut sejahtera.

Relasi antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Kemudian diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi; pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar

dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. (Lulus Prapti 2006).



Sumber : Perekonomian Indonesia, Achma (2011)

2.1.6 Analisis Potensi Perekonomian Wilayah

Dengan berlakunya Otonomi daerah , di masing-masing daerah kini lebih memiliki wewenang didalam menentukan sektor atau komoditi yang lebih diprioritaskan untuk pengembangannya. Peran pemerintah untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan dari sektor yang akan di unggulkan sangat dibutuhkan. Sehingga, *leading sector* tersebut dapat mempengaruhi sektor yang lainnya untuk dapat berkembang. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan potensi perekonomian suatu wilayah yaitu *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift-Share*, dan analisis Tipologi Klassen.

2.1.6.1. Pengukuran sektor basis

Dalam melakukan pengukuran basis menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) , yang dimana membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Sektor Basis

Kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.

2. Sektor Non Basis

Kegiatan ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut.

Asumsi pada analisis LQ adalah semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor.(Lincoln Arsyad, 1999).

Sedangkan Rumus *Location Quotient* (LQ) adalah (Tarigan, 2005):

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N} \dots\dots\dots(2-4)$$

Keterangan :

S_i = Nilai tambah sektor i di Kabupaten/Kota

S = PDRB di Kabupaten/Kota

N_i = Nilai tambah sektor i di Provinsi

N = PDRB (Provinsi)

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

2.1.6.2. Pengukuran sektor yang berkembang didaerah (*Shift Share*)

Shift Share adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (nasional). Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi referensi nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan referensi terhadap perekonomian di Kabupaten/Kota.
- b. Pergeseran proporsional (*Proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di Kabupaten/Kota terhadap sektor yang sama di referensi.
- c. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*), yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri Kabupaten/Kota dengan perekonomian yang dijadikan referensi (Arsyad, 1999).

Menurut Widodo (2006), bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

- $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$ (2.5)

- $N_{ij} = E_{ij} \times R_n$ (2.6)

- $M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n)$ (2.7)

- $C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$ (2.8)

Keterangan :

i = Sektor-sektor yang diteliti

j = Wilayah yang teliti (Kabupaten/Kota)

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (di tiap Kabupaten/Kota) dari pengaruh pertumbuhan nasional (Provinsi)

N_{ij} (*National share*) = Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional (Provinsi) terhadap perekonomian daerah (di tiap Kabupaten/Kota)

M_{ij} = Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

C_{ij} (*Differential Shift*) = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu di (tiap Kabupaten/Kota) dibanding tingkat nasional (Provinsi)

E_{ij} = PDRB (Output) sektor i (di tiap Kabupaten/Kota)

R_{ij} = Tingkat pertumbuhan sektor i (di tiap Kabupaten/Kota)

R_{in} = Tingkat pertumbuhan sektor i (Provinsi)

R_n = Tingkat pertumbuhan PDRB (Provinsi)

2.1.6.3. Tipologi Klassen

Menurut Kuncoro (2004), menyebutkan bahwa Tipologi Klassen (*Klassen Typology*) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi

daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth*), daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*), daerah berkembang cepat (*Growing Region*), dan daerah relatif tertinggal (*Relatively Region*). Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen

y / S r / S_k	$y_i > y$ $S_i > S$	$y_i < y$ $S_i < S$
$r_i > r$ $S_{ki} > S_K$	Kuadran I Wilayah maju dan tumbuh cepat (<i>Developed Sector</i>)	Kuadran II Wilayah maju tetapi tertekan (<i>Stagnant Sector</i>)
$r_i < r$ $S_{ki} < S_K$	Kuadran III Wilayah yang berkembang cepat (<i>Developing Sector</i>)	Kuadran IV Wilayah yang relatif tertinggal (<i>Undeveloped Sector</i>)

Sumber : Sjafrizal (2008)

Keterangan

y = PDRB per kapita Provinsi

y_i =PDRB per kapita di Kabupaten/Kota

r =Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi

r_i =Laju pertumbuhan PDRB tiap Kabupaten/Kota

S =PDRB Provinsi

S_i =Nilai sektor i di Kabupaten/Kota

S_{ki} =Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Kabupaten/Kota

S_K =Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Provinsi

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2003)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Indeks Entropy Theil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan tertinggal. 2. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets berlaku di Kab. Banyumas.
2	Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Provinsi Riau (Caska dan RM, Riadi, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB Perkapita • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Tipologi Klassen • Indeks Williamson • Indeks Entropi Theil • Kurva U Kuznet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen di Provinsi Riau, daerah yang mengalami cepat maju dan cepat tumbuh (<i>high growth and high income</i>) hanya 1 (satu) daerah saja yakni Kota Pekanbaru. Daerah atau kabupaten yang dikategorikan berkembang cepat dalam arti pertumbuhan (<i>high growth but low income</i>) adalah Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak. Untuk daerah atau kabupaten yang maju tapi tertekan (<i>high income but low growth</i>) adalah pada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, sedangkan daerah yang pembangunan atau pertumbuhannya relatif tertinggal adalah Kabupaten Rokan Hilir, Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

				2. Selama periode pengamatan 2003- 2005, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Provinsi Riau yang mengatakan adanya kurva U terbalik.
3	Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. (Etik Umiyati, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB Per kapita • Laju Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson 	1. Masalah ketimpangan pembangunan antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan Perekonomian Pulau Jawa saja, tetapi juga Luar Pulau Jawa, salah satunya adalah Pulau Sumatera. angka ketimpangan pembangunan antarwilayah menunjukkan bahwa Propinsi Kepulauan Riau mempunyai angka indeks yang relatif tertinggi jika dibandingkan dengan Propinsi lainnya, hal ini disebabkan karena propinsi ini adalah salah satu propinsi pemekaran dari Propinsi Riau. Untuk wilayah Propinsi lainnya seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung mempunyai angka indeks cenderung mendekati nol atau relatif lebih merata.
4	Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (Cholif	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB Per kapita • Laju Pertumbuhan • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Laju Pertumbuhan • Analisis <i>Location Quotient</i> 	1. Sektor-sektor yang berpotensi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis LQ, Shift-share dan Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena banyaknya kabupaten (24 kabupaten) di Propinsi Jawa Tengah menjadikan sektor

	Prasetio Wicaksono, 2010)		(LQ) <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Shift Share • Tipologi Klassen • Indeks Williamson • Indeks Entropi Theil 	<p>pertanian ini menjadi sektor basis. Akan tetapi laju pertumbuhannya sektor pertanian mengalami mengalami penurunan setiap tahunnya. Sektor pertanian termasuk dalam kuadran 1 (sektor yang maju dan tumbuh pesat) di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pekalongan saja, kebanyakan di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah sektor ini merupakan sektor yang maju tapi tertekan (kuadran 2). Sektor industri merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB sehingga termasuk sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah meskipun hanya merupakan sektor basis di lima (5) kabupaten saja yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap.</p> <p>2. Pengklasifikasian Kabupaten/Kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Propinsi Jawa Tengah memakai alat analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2003-2007 yang merupakan daerah relatif tertinggal (termasuk dalam kuadran IV). Sebanyak 14 kabupaten pada kuadran ini merupakan daerah yang relatif tertinggal yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.</p>
--	---------------------------	--	--	--

				<p>3. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dianalisis menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Theil. Hasilnya yaitu bahwa ketimpanga/disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2003-2007 tergolong tinggi, karena berada diatas ambang batas 0,5. Indeks Theil dan indeks Williamson yang menunjukkan adanya disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa tengah tersebut belum menunjukkan kecenderungan menurun karena masih tergolong tinggi.</p>
5	<p>Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota yang Tergabung dalam Kawasan Kedugsepur tahun 2004-2008 (Putra Fajar Utama,2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Laju Pertumbuhan Ekonomi • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Analisis <i>Location Quotient</i> • Analisis <i>Shift Share</i> • Analisis Tipologi Klassen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan analisis ketimpangan dengan menggunakan indeks Williamson, diperoleh angka 0,21. Artinya ketimpangan pendapatan di KEDUNGSEPUR termasuk ketimpangan yang rendah karena indeks Williamsonnya kurang dari 0,5 2. Berdasarkan analisis dengan menggunakan <i>Location Quotient</i> (LQ), diperoleh kesimpulan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi keunggulan di KEDUNGSEPUR. 3. Berdasarkan analisis dengan menggunakan <i>Shift Share</i>, sektor di Kabupaten/Kota yang berdampak positif terhadap sektor yang sama di KEDUNGSEPUR adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi , sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. 4. Berdasarkan Tipologi Klassen per sektor yang termasuk kategori sektor pada Kuadran I di KEDUNGSEPUR

				<p>adalah sektor pertanian. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Yang termasuk kategori sektor Kuadran II adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. Yang termasuk dalam kategori sektor Kuadran III adalah sektor industry pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dan yang termasuk dalam kategori sektor Kuadran IV di KEDUNGSEPUR adalah sektor bangunan.</p> <p>5. Berdasarkan Tipologi Klassen wilayah. Kota Semarang termasuk Kuadran I, Kab. Salatiga dan Kota Salatiga termasuk Kuadran II, dan Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab Semarang termasuk Kuadran III</p>
6	<p>Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Boyolali 2006-2009. (Parwantiningsih, 2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB per kapita • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen • Indeks Williamson • Hipotesis Kuznets 	<p>1. Laju Pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Boyolali tahun 2006-2009 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2006 sebesar 4,19% menjadi 4,08% pada tahun 2007 dan tahun 2008 laju pertumbuhannya 4,04% serta mengalami kenaikan pada tahun 2009 laju pertumbuhannya yaitu 5,16%. Beberapa tahun tersebut pertumbuhannya menunjukkan arah yang negatif kecuali pada tahun 2009 yaitu sudah masuk kriteria pertumbuhan Kabupaten Boyolali diatas 5% jadi sudah menunjukkan arah yang positif.</p> <p>2. Terdapat pengelompokan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tipologi kelas di Kabupaten Boyolali : Kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kecamatan Boyolali, Kecamatan Sawit, Kecamatan Simo dan Kecamatan Karanggede. Kategori daerah maju tapi tertekan meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo,</p>

				<p>Kecamatan Teras dan Kecamatan Banyudono. Daerah yang berkembang cepat adalah Kecamatan Ngeplak, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Wonosegoro. Daerah yang tertinggal adalah Kecamatan Selo. Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Juwangi</p> <p>3. Rata-rata ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Boyolali tahun 2006-2009 adalah 0,05 , jadi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Boyolali relatif merata karena angkanya mendekati 0.</p> <p>4. Kurva Kuznets atau yang biasa disebut kurva U terbalik tidak berlaku di Kabupaten Boyolali pada tahun penelitian.</p>
7	<p>Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2004-2008 (Rendi Hangga Kusuma, 2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Laju Pertumbuhan Ekonomi • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Laju pertumbuhan • Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) • Analisis Tipologi Klassen • Indeks Williamson • Indeks 	<p>1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode penelitian antara periode 2003-2008 mengalami fluktuasi menyesuaikan situasi perekonomian yang sedang terjadi. Laju Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah rata-rata 5,43% setiap tahun, jumlah tersebut masih belum bisa ditingkatkan lagi karena banyak potensi yang dimiliki oleh Jawa tengah yang belum dikelola dengan maksimal.</p> <p>2. Pengklasifikasian Kabupaten/Kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Provinsi Jawa Tengah memakai alat analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2008 yang merupakan daerah realtif tertinggal (termasuk dalam kuadran IV). Sebanyak 16 kabupaten</p>

			Entropi Theil	<p>pada kuadran ini merupakan daerah yang relatif tertinggal yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang</p> <p>3. Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dianalisis menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Theil. Hasilnya yaitu bahwa ketimpangan/disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2008 tergolong tinggi kriteria berada diatas ambang batas 0,5. Indeks theil dan indeks Williamson yang menunjukkan adanya disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tersebut belum menunjukkan kecenderungan menurun karena masih tergolong tinggi.</p>
8	Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010 (Adi Sutrisno, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB Per kapita • Laju Pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Indeks Entropi Theil • Analisis <i>Location Quotient</i> • Analisis <i>Shift Share</i> 	<p>1. Berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan pendapatan diperoleh hasil bahwa pada periode Tahun 2007-2010 terjadi kecenderungan adanya peningkatan ketimpangan di Kawasan Barlingmascakeb, baik dianalisis dengan menggunakan indeks williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Angka rata-rata indeks Williamson di Kawasan Barlingmascakeb sebesar 0.185. Sedangkan angka rata-rata indeks entropi Theil menunjukkan hasil sebesar 0.722. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Barlingmascakeb</p>

				<p>masih relatif rendah.</p> <p>2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis <i>Location Quotient</i>, <i>Shift Share</i>, maupun tipologi kelas maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Kabupaten Banjarnegara memiliki sektor unggulan di sektor jasa-jasa. Kabupaten Purbalingga memiliki sektor unggulan di sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Kabupaten Banyumas memiliki sektor unggulan di sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan di sektor pertanian, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Kebumen memiliki sektor unggulan di sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalan. Daerah yang direkomendasikan sebagai pusat pelayanan utama di Kawasan Barlingmascakeb adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.</p>
9	Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Antar Kecamatan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Di Kabupaten Karangasem	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB Per kapita • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Analisis <i>Location Quotient</i> • Analisis <i>Shift Share</i> • Tipologi Klassen 	<p>1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan telah terjadi disparitas yang semakin meningkat dan tergolong dalam katategori sedang antar kecamatan di Kabupaten Karangasem. Adapun sektor ekonomi yang strategis dan potensial dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masing-masing kecamatan adalah:</p> <p>(a) Kecamatan Rendang adalah sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.</p>

	(Amrillah dan I Nyoman Mahaendra Yasa, 2013)			<p>(b) Kecamatan Sidemen adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor jasa-jasa.</p> <p>(c) Kecamatan Manggis adalah sektor bangunan/konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor listrik, gas, dan air bersih.</p> <p>(d) Kecamatan Karangasem adalah sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor jasa-jasa; dan sektor bangunan/konstruksi.</p> <p>(e) Kecamatan Abang adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; dan sektor jasa-jasa.</p> <p>(f) Kecamatan Bebandem adalah sektor pertambangan dan penggalan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.</p> <p>(g) Kecamatan Selat adalah sektor pertambangan dan penggalan; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.</p> <p>(h) Kecamatan Kubu adalah sektor pertambangan dan penggalan; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor pertanian.</p>
10	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB Per kapita • Laju Pertumbuhan • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen • Indeks Williamson 	1. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen pengklasifikasian Kabupaten/Kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Kabupaten Gianyar menunjukkan Kecamatan di Kabupaten Gianyar terbagi menjadi empat klasifikasi yang ada. Pada Periode 1993-2009 Sebanyak empat Kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Blahbatuh,

	Kabupaten Gianyar (Ngakan Putu Mahesa Eka Raswita dan Made Suyana Utama, 2013)			<p>Gianyar, Tegallang berada pada kuadran IV. Kecamatan Payangan berada pada kuadran III dan Kecamatan Tampaksiring berada pada Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan. Kecamatan Ubud berada pada Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh.</p> <p>2. Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gianyar periode 1993-2000 antar kecamatan pada periode tersebut mengalami peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di kabupaten Gianyar periode penelitian adalah sebesar 0,300. Kurva hubungan antara Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita menunjukkan bentuk U terbalik, dapat dikatakan hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Gianyar pada periode penelitian (1993 -2009).</p>
--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Pembangunan ekonomi baik secara Nasional maupun secara Regional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang mempengaruhi Pembangunan ekonomi pada suatu daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat ketimpangan yang kecil antar masyarakat, antar wilayah dan antar sektor.

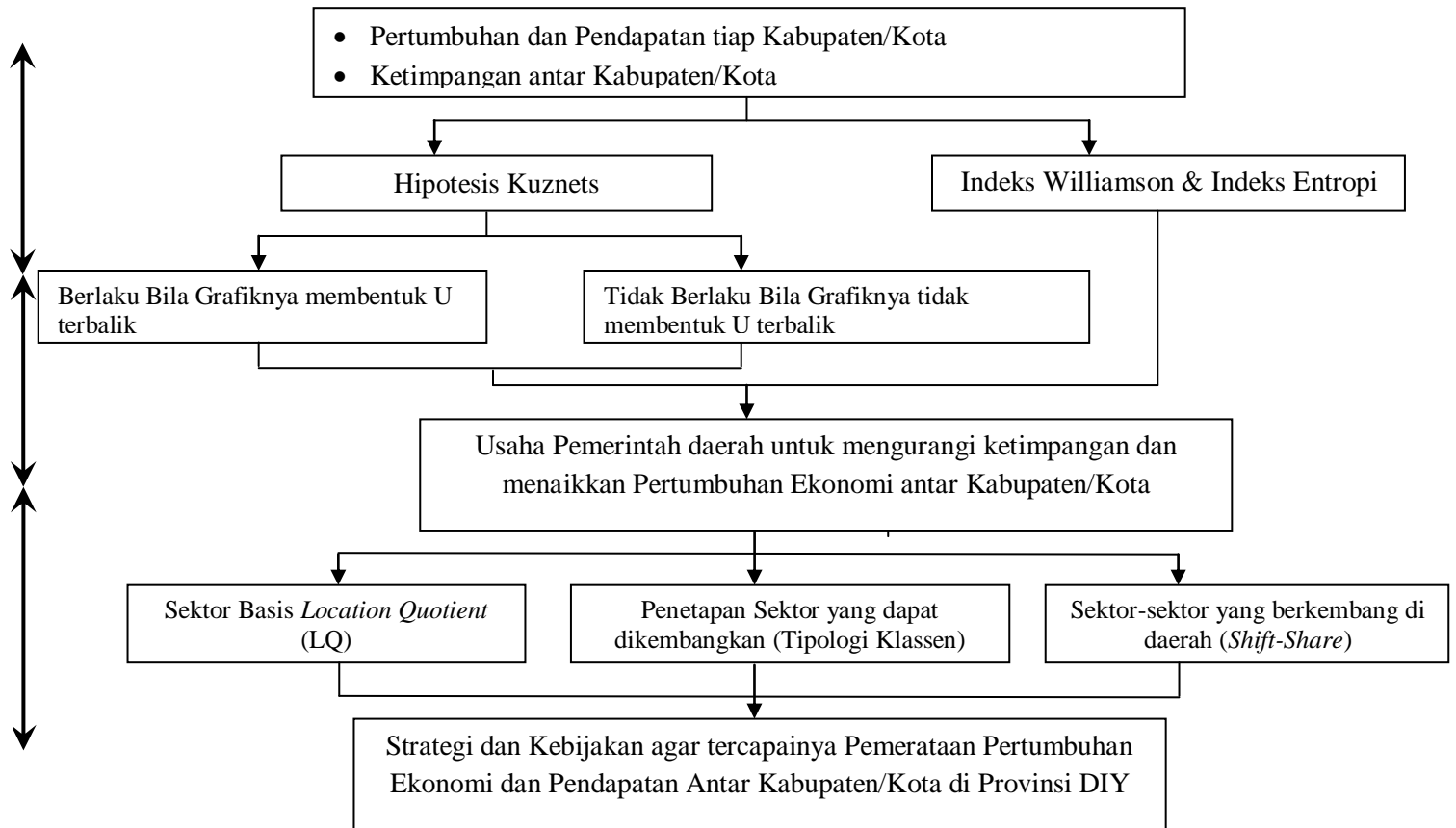
Ketimpangan pendapatan antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan permasalahan didalam proses pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilihat melalui PDRB dan PDRB perkapita. PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Sedangkan PDRB perkapita adalah hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk yang dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2003-2012 menggunakan Indeks Williamson (IW) dan Indeks Entropi Theil, dengan besaran nilai antara 0-1. Semakin besar IW maka semakin besar ketimpangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai $IW < 0,3$ berarti disparitas pendapatan yang terjadi tergolong rendah, IW antara 0,3 – 0,5 termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika $IW > 0,5$. Sedangkan, Indeks Entropi Theil bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks

mendekati 0 berarti sangat merata. Selain itu juga membuktikan apakah kurva U terbalik berlaku di Provinsi DIY atau tidak. Untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu diketahui sektor-sektor yang berpotensi di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift-share* dan Tipologi Klassen. Kemudian memberikan saran untuk pemerintah daerah berupa strategi dan kebijakan agar tercapainya Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

- Tujuan Penelitian:**
1. Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Membuktikan benar/tidaknya hipotesis kuznet tentang Kurva U terbalik berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Menganalisis sektor potensial di Kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Mudrajad Kuncoro (2003) dengan modifikasi sesuai dengan objek penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Sedangkan, Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi. Dan dalam penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase.

2. PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Ukuran PDRB dalam penelitian ini adalah metode pendapatan dalam rupiah. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY.

3. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berada dalam wilayah tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah angka Indeks Williamson dan angka Indeks Entropi Theil.

4. Hipotesis Kuznet

Kurva U terbalik yaitu posisi pertumbuhan ekonomi yang pada tahap awal mengalami ketimpangan yang memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk kurva U terbalik yaitu dengan menghubungkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dengan Pertumbuhan PDRB.

3.2. Populasi

Menurut Sugiyono (2004), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah PDRB 5 kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY yang dihitung berdasarkan harga konstan dari tahun 2003-2012. Alasan peneliti menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan pertimbangan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. Dengan menggunakan harga konstan maka, perkembangan agregat dari tahun ke

tahun disebabkan oleh perkembangan riil produksi tanpa mengandung fluktuasi harga maupun inflasi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), literatur-literatur berupa buku maupun jurnal , dan lain lain yang dapat mendukung penelitian. Jenis Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, data runtut waktu (*time series*) pada periode tahun 2003-2012. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Provinsi DIY. Data yang digunakan adalah :

1. PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2003-2012.
2. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2003-2012.
3. Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2003-2012.
4. Jumlah penduduk Provinsi DIY tahun 2003-2012.
5. Data Geografis dan data-data yang mendukung penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk kepentingan penelitian ini diperlukan data yang objektif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Menurut Parwantiningsih (2011), Dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda

tertentu seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan , notulen rapat , catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, PDRB perkapita antar di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2003-2012 di Badan Pusat Statistik.

Sedangkan, wawancara menurut Indriyanto (2013) Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah daerah dari BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bagian Perekonomian yang dibantu dengan pedoman wawancara.

3.5. Metode Analisis

3.5.1 Analisis Tingkat Ketimpangan Regional

Alat analisis tingkat ketimpangan regional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil . Yang dimana masing-masing indeks memiliki cara perhitungan dan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat ketimpangan Di Provinsi DIY dilakukan perhitungan dengan Indeks Williamson maupun dengan Indeks Entropy Theil.

3.5.1.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Dalam Penelitian Sutarno & Kuncoro (2003), Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan

ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Sjafrizal, 2012) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2(f_i/n)}}{Y} \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

- IW : Indeks Williamson
- Y_i : PDRB Per kapita tiap Kabupaten/Kota
- Y : PDRB Per kapita Provinsi DIY
- F_i : Jumlah Penduduk tiap Kabupaten/Kota
- n : Jumlah Penduduk Provinsi DIY

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara angka 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson : Jika nilai I_w menjauhi 0 (no1), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai I_w mendekati 0 (no1), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.

Semakin besar nilai indeks, berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Apabila nilai Indeks Williamson diatas 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan tinggi. Namun apabila nilai Indeks Williamson dibawah 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan rendah.

3.5.1.2 Indeks Entropi Theil

Menurut Ying, (2000) (dikutip oleh Kuncoro 2004) Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi/diurrai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks Ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam subunit geografis yang lebih kecil, pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua ketika mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial.

Data yang diperlukan untuk menghitung indeks Entropi Theil sama dengan yang diperlukan untuk menghitung *Williamson Index* yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Penafsiran indeks ini dengan indeks Williamson sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. (Sjafrizal, 2012)

Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

$$I(y) = \sum (y_j/Y) x \log[(y_j/Y)/(x_j/X)] \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana :

I(y) : Indeks Entopi Theil

y_j : PDRB per kapita Kabupaten/Kota j

Y : Rata-rata PDRB per kapita Provinsi DIY

x_j : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota j

X : Jumlah penduduk Provinsi DIY

3.5.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Menurut Tarigan (2005), Metode *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah (Kabupaten/Kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (Provinsi DIY).

Rumus *Location Quotient* (LQ) adalah (Tarigan, 2005):

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N} \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan :

S_i = Nilai tambah sektor i di Kabupaten/Kota

S = PDRB di Kabupaten/Kota

N_i = Nilai tambah sektor i di Provinsi DIY

N = PDRB (Provinsi DIY)

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

3.5.3 Analisis Shift Share

Analisis ini pada dasarnya membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah. Pendekatan analisis ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan suatu daerah dengan cara membandingkan nilai sektor suatu daerah yang berada lebih rendah (Kabupaten/Kota) dengan nilai sektor di daerah yang lebih tinggi (Provinsi). Analisis *Shift Share* menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY (*regional share*)

Menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY terhadap perekonomian di tiap Kabupaten/Kota. Nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY positif jika pertumbuhan ekonomi di tiap Kabupaten/Kota tumbuh lebih cepat . Nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY negatif jika pertumbuhan ekonomi di tiap

Kabupaten/Kota tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY.

2. Pergeseran Proporsional (*proportional shift*)

Menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu (Kabupaten/Kota) terhadap sektor yang sama di daerah yang lebih tinggi (Provinsi DIY). Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan referensi. Nilai komponen ini positif jika di tiap Kabupaten/Kota yang berspesialisasi dalam sektor-sektor di daerah yang lebih tinggi (Provinsi DIY) tumbuh lebih cepat dan bernilai negatif jika di tiap Kabupaten/Kota yang berspesialisasi dalam sektor-sektor di daerah yang lebih tinggi (Provinsi) tumbuh dengan lambat atau merosot.

3. Pergeseran differensial (*differential shift*)

Menunjukkan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing tiap sektor daerah yang lebih rendah (Kabupaten/Kota) dengan sektor yang berada di daerah yang lebih tinggi (Provinsi DIY). Jika pertumbuhan suatu sektor positif, maka sektor tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah yang lebih tinggi (Provinsi DIY). Pergeseran differensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Nilai komponen ini positif, jika sektor tersebut merupakan sektor yang kompetitif karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak

menguntungkan akan mempunyai nilai negatif dan mengalami penurunan *competitiveness*.

Menurut Widodo (2006), bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

- $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$ (3.4)

- $N_{ij} = E_{ij} \times R_n$ (3.5)

- $M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n)$ (3.6)

- $C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in})$ (3.7)

Keterangan :

i = Sektor-sektor yang diteliti

j = Wilayah yang teliti (Kabupaten/Kota)

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (di tiap Kabupaten/Kota) dari pengaruh pertumbuhan nasional (Provinsi DIY)

N_{ij} (*National share*) = Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional (Provinsi DIY) terhadap perekonomian daerah (di tiap Kabupaten/Kota)

M_{ij} = Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

C_{ij} (*Differential Shift*) = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu di (tiap Kabupaten/Kota) dibanding tingkat nasional (Provinsi DIY)

E_{ij} = PDRB (Output) sektor i (di tiap Kabupaten/Kota)

R_{ij} = Tingkat pertumbuhan sektor i (di tiap Kabupaten /Kota)

R_{in} = Tingkat pertumbuhan sektor i (Provinsi DIY)

R_n = Tingkat pertumbuhan PDRB (Provinsi DIY)

3.5.4 Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Sjafrizal (2008) menjelaskan bahwa

dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (*rapid growth region*), daerah tertekan (*retarded region*), daerah sedang berkembang (*growing growth*) dan daerah relative tertinggal (*relatively backward region*). Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen

y / S r / S_k	$y_i > y$ $S_i > S$	$y_i < y$ $S_i < S$
$r_i > r$ $S_{ki} > S_K$	Kuadran I Wilayah maju dan tumbuh cepat (<i>Developed Sector</i>)	Kuadran II Wilayah maju tetapi tertekan (<i>Stagnant Sector</i>)
$r_i < r$ $S_{ki} < S_K$	Kuadran III Wilayah yang berkembang cepat (<i>Developing Sector</i>)	Kuadran IV Wilayah yang relatif tertinggal (<i>Undeveloped Sector</i>)

Sumber : Sjafrizal (2008)

Keterangan

y = PDRB per kapita Provinsi DIY

y_i =PDRB per kapita di Kabupaten/Kota

r =Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi DIY

r_i =Laju pertumbuhan PDRB tiap Kabupaten/Kota

S_i =Nilai sektor i di Kabupaten/Kota

S =PDRB Provinsi DIY

S_{ki} =Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Kabupaten/Kota

S_K =Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Provinsi DIY

1. Daerah/sector tumbuh maju dan cepat (*Rapid Growth region* / Kuadran I)

Daerah/sector maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang

lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah/ sektor maju tapi tertekan (*Retarded Region* / Kuadran II)

Daerah/ sektor maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah/sektor berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran III)

Daerah/sektor berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah/sektor relatif tertinggal (*Relatively Backward Region* / Kuadran IV)

Kemudian daerah/sector relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Daerah yang memiliki tingkat kemakmuran yang relatif rendah dapat mengejar ketertinggalannya melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian , tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

3.5.5 Analisis Kurva U terbalik

Kurva U terbalik oleh Kuznets dalam Todaro (2006), yaitu dimana pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan akan memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan naik dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk kurva U terbalik.

Menurut Kuncoro (2004), mengatakan hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara indeks ketimpangan dan pertumbuhan PDRB. Grafik tersebut merupakan hubungan antara indeks ketimpangan Williamson dengan pertumbuhan PDRB maupun indeks ketimpangan entropi theil dengan pertumbuhan PDRB pada periode pengamatan. Dalam penelitian ini pembuktian kurva U Terbalik yaitu dengan menghubungkan antara Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY dengan angka indeks Williamson maupun dengan indeks entropi theil.